



## Pengembangan Wisata Bahari Berkelanjutan melalui *Partisipative Approach* di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue

Agatha Debby Reiza Macella<sup>1</sup>, Agus Pratama<sup>2</sup>, Veni Nella Syahputri<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia

Korespondensi: [aguspratama@utu.ac.id](mailto:aguspratama@utu.ac.id)

### RIWAYAT ARTIKEL

Diterima: 24/01/2024

Ditelaah: 06/03/2024

Diterbitkan: 12/11/2024

### KUTIPAN

Macella, A.D.R., et.al (2024). Pengembangan Wisata Bahari Berkelanjutan melalui *Partisipative Approach* di Desa Busung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 13-27, doi: 10.47753/pjap.v5i1.60



### Abstrak

Pulau Simeulue merupakan salah satu wilayah kepulauan yang memiliki pesona destinasi wisata bahari potensial. Untuk mengoptimalkan pariwisata berkelanjutan maka dibutuhkan kerjasama serta peran kolaboratif dalam pengembangan wisata bahari. Salah satu lokasi wisata bahari terletak di pantai Busung Desa Busung Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue. Pantai Busung memiliki daya pikat laut dan hamparan pasir yang indah akan tetapi pesona alam yang disuguhkan belum dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Simeulue. Belum optimalnya pengelolaan sampah, *faulty belief system* masyarakat yang beranggapan pembangunan di Pantai hanya akan memberikan keuntungan sepihak, kurangnya antusiasme masyarakat dalam pembangunan wisata pantai, masalah sumber daya manusia yang masih minim dalam pengelolaan wisata merupakan masalah dasar yang harus diatasi oleh pemerintah. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pengembangan wisata bahari berkelanjutan melalui pendekatan partisipasi di desa busung. Penelitian ini diusung dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengembangan wisata Bahari berkelanjutan di Desa Busung masih pada tingkat *Consultation* yaitu telah terjalin komunikasi dua arah antara Pemerintah Kabupaten Simeulue dengan Pemerintah Desa Busung tetapi masih bersifat formalitas. Esensi dari *consultation* yaitu telah terlaksana beberapa kegiatan seperti penjangkaran aspirasi melalui pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan Teupah Tengah, kunjungan lapangan oleh Disbudpar, adanya pengajuan proposal untuk pengembangan wisata pantai busung. Dari upaya tersebut belum berdampak baik pada wisata bahari di Desa Busung.

**Kata kunci:** Berkelanjutan; Partisipasi; Pengembangan; Wisata Bahari.

### Abstract

*Simeulue Island is one of the archipelago areas that has the charm of a very potential marine tourism destination. To optimize sustainable tourism, cooperation and a collaborative role are needed in the development of marine tourism. One of the marine tourism locations is located on Busung beach, Busung Village, Teupah Tengah District, Simeulue Regency. Busung Beach has the allure of the sea and a beautiful stretch of sand, but the natural charm it offers is not utilized properly by the Simeulue Regency government. The lack of optimal waste management, the faulty belief system of the community which thinks that development on the beach will*



*only provide one-sided benefits, the lack of enthusiasm of the community in developing beach tourism, the problem of human resources which are still minimal in tourism management are basic problems that must be overcome by the government. The aim of the research is to find out how to develop sustainable marine tourism through a Participation approach in Busung village. This research was carried out using qualitative methods with a qualitative descriptive approach. Based on the research results, it can be concluded that the development of sustainable marine tourism in Busung Village is still at the consultation level, namely that there has been two-way communication between the Simeulue Regency Government and the Busung Village Government but it is still a formality. The essence of the consultation is that several activities have been carried out, such as gathering aspirations through meetings facilitated by the Teupah Tengah District Government, field visits by the Disbudpar, submission of proposals for the development of Busung beach tourism. These efforts have not had a good impact on marine tourism in Busung Village.*

**Keywords:** *Development; Marine Tourism; Participation; Sustainability*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara maritim (Wiranto, 2020). Sebagai negara maritim Indonesia memiliki luas wilayah laut 3,257 juta km<sup>2</sup>, luas wilayah laut yang dapat dikelola mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup>. Modalitas pada sektor kelautan yang dimiliki Indonesia terdiri dari 99 ribu kilometer garis pantai, 20,87 juta ha kawasan konservasi perairan, pesisir, serta terdapat pulau-pulau kecil yang berpotensi untuk dikelola sebagai pariwisata bahari (Maulana, 2021). Kekayaan sumber daya alam laut Indonesia dapat dideskripsikan melalui keragaman ekosistem terumbu karang, lamun, serta mangrove. Secara ekstrapolasi, Indonesia memiliki luas terumbu karang mencapai angka 2,5 juta hektar, terdapat 569 varian terumbu karang di Indonesia atau sekitar 67% dari 845 total spesies karang di dunia (Masjhoer, 2019). Berbagai fakta tersebut tentunya menjadi bukti bahwa sektor kelautan menjadi hal yang sangat strategis bagi Negara Indonesia.

Saat ini potensi ekonomi kelautan Indonesia mulai dikelola dengan baik dan inovatif, sehingga menjadi salah satu sasaran pembangunan serta dapat memberikan manfaat yang optimal bagi negara dan masyarakat Indonesia. Hal tersebut juga didukung dengan adanya kebijakan Presiden Joko Widodo yang menjadikan Indonesia sebagai “Poros Maritim Dunia”. Kebijakan tersebut menjadi cikal bakal pesatnya pembangunan terhadap sektor kemaritiman Indonesia. Bukan hanya itu saja, potensi kemaritiman dapat memberikan dampak yang positif bagi majunya dunia pariwisata Indonesia. Karena secara potensi kelautan Indonesia memiliki banyak peluang yang dapat dikembangkan menjadi wilayah pariwisata. Selain itu, sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam mendukung sektor bahari ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Sehingga, setiap wilayah melalui pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola pariwisata bahari secara optimal dan berkelanjutan (Maulana, 2021).

Kondisi alam bahari yang sangat potensial tentunya dapat dikembangkan menjadi potensi-potensi lainnya salah satunya dengan pariwisata. Oleh sebab itu tidak heran jika dengan branding pariwisata sebuah wilayah dapat dikenal di seluruh dunia seperti Pulau Bali dan Lombok. Pesona laut Indonesia tersebar di berbagai wilayah nusantara dari barat hingga ke ujung timur.



Pemerintah Indonesia sangat peduli dengan sektor pariwisata. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya berbagai program dalam meningkatkan pendapatan pariwisata, peningkatan anggaran, serta kebijakan yang berkaitan untuk memajukan pariwisata Indonesia.

Pembangunan daerah melalui sektor pariwisata juga telah dilakukan, dimana setiap daerah diperkenankan untuk mempromosikan potensi pariwisata yang dimiliki melalui berbagai cara seperti media sosial, berita, situs web daerah, iklan televisi dan sebagainya. Dalam pengembangan pariwisata bahari terdapat berbagai jenis pariwisata meliputi pariwisata berbasis keindahan alam, berbasis budaya atau tradisi bahari, kemudian pariwisata berbasis aktivitas seperti kegiatan selancar dan memancing, hingga berbasis kepada festival-festival yang bersifat bahari (Maulana, 2021). Sektor bahari menjadi salah satu peluang besar Indonesia untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yaitu Menuju Indonesia Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur yang dibangun melalui 4 pilar pembangunan salah satunya adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi inilah yang dapat diupayakan melalui berbagai sektor salah satunya ialah melalui pengembangan wisata bahari.

Salah satu wilayah Indonesia yang memiliki potensi bahari ialah Kabupaten Simeulue. Simeulue merupakan sebuah pulau yang terletak di Provinsi Aceh yang memiliki pesona wisata bahari yang sangat mengagumkan. Selain itu, pengembangan wisata bahari disana turut didukung dengan wisata budaya masyarakatnya yang khas, hasil akulturasi masyarakat Minang, Aceh, Batak, dan Jawa. Keanekaragaman ini dapat menjadikan modalitas terhadap budaya mereka dalam mendukung potensi wisata. Wisata bahari merupakan sektor unggulan bagi Simeulue. Keberagaman objek wisata bahari dapat dijadikan sebagai peluang daerah dalam mensejahterakan masyarakatnya, mulai dari *surfing*, *sailing*, *snorkeling*, *diving*, apabila dapat dikelola dengan baik akan berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar. Pesisir pantai daerah ini mempunyai daya tarik yang begitu mempesona dan masuk dalam standar internasional sebagai wilayah tempat *surfing*. Faktor pematik lainnya yaitu taman laut yang mengelilingi sebagian besar pulau ditambah dengan pantai yang indah bersih dan asri merupakan peluang yang menjanjikan bagi Simeulue.

Pulau Simeulue memiliki banyak tempat wisata yang indah dan perlu untuk dikembangkan. Adapun jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Simeulue pada tahun 2015 berjumlah 28.032 ribu orang, dengan rincian 27.641 orang wisatawan domestik dan 391 orang wisatawan asing (Pusat Data, 2015). Salah satu lokasi wisata bahari di Pulau Simeulue adalah Pantai Busung yang terletak di Desa Busung Kecamatan Teupah Tengah. Keunggulan pantai tersebut terletak pada hamparan pasir putih, hamparan batu karang di pinggir pantai, vegetasi cemara yang membuat udara terasa segar dan sejuk ditambah lagi dengan pepohonan kelapa, air laut yang jernih dengan kumpulan koral yang beraneka warna, secara letak geografis pantai Busung sangatlah mendukung sebagai objek wisata karena letaknya dekat dengan pusat kota Kabupaten Simeulue. Wisata Pantai Busung masih terdapat kekurangan yaitu seperti pengelolaan sampah yang masih buruk, adanya anggapan bahwa pembangunan di pantai tersebut hanya akan memberikan keuntungan sepihak dan kurangnya antusiasme masyarakat dalam pembangunan wisata pantai tersebut (Nauli, 2020). Hal tersebut juga dinyatakan oleh Indriani dalam *proceeding* pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir terpadu bahwa dari segi kualitas wisata bahari Indonesia masih jauh dari harapan khususnya masalah sumber daya manusia yang masih minim dalam pengelolaan wisata bahari sehingga menjadi kendala dalam pengembangannya setiwati dalam (Bengen, 2000).

Padahal sejatinya pengembangan wisata bahari memiliki peranan ekonomis dalam meningkatkan pendapatan devisa negara, pendapatan daerah, serta mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah sekitar sehingga, dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apalagi jika dikembangkan secara berkelanjutan, tentunya bukan hanya memberikan manfaat ekonomi namun juga manfaat bagi kelestarian lingkungan di sekitar wisata bahari.

Berkaitan dengan pengembangan pariwisata bahari tentunya menjadi tugas penting bukan hanya bagi pemerintah sebagai pembuat regulasi, namun juga perlu untuk mengajak masyarakat untuk ikut ambil



bagian dalam pengembangan pariwisata bahari, khususnya pada pantai Busung. Partisipasi dari masyarakat merupakan bagian dalam proses identifikasi masalah, memanfaatkan potensi yang ada, dengan adanya peran masyarakat dapat mempermudah pengambilan keputusan tentang alternatif solusi atas masalah yang dihadapi, selain itu masyarakat juga diharapkan terlibat dalam pelaksanaan serta ikut dalam proses evaluasi kegiatan bahari. Masyarakat harus berperan aktif dengan stakeholder untuk menjamin keberhasilan pengembangan pariwisata bahari.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini melihat bagaimana tingkat keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata bahari berkelanjutan di Desa Busung Kecamatan Tepah Tengah Kabupaten Simeulue. Ihwal ini menarik untuk dikaji lebih mendalam karena esensi dari pendekatan partisipasi dapat dilihat dari adanya peran kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat.

Penelitian dengan topik pengembangan wisata bahari berkelanjutan telah banyak dilakukan sebelumnya oleh para peneliti lainnya. Akan tetapi, terdapat beberapa titik perbedaan dalam penelitian. Berikut merupakan beberapa hasil riset penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian peneliti, penelitian miliknya Bibin et al.,(2018) dengan hasil penelitian Dinas Pariwisata Palopo sebagai pelopor dalam pengelolaan dan pengembangan wisata secara penuh melibatkan *key players* lainnya dalam proses perumusan dan evaluasi strategi pengembangan wisata bahari di kota Palopo. Dinas Pariwisata setempat telah menjalin komunikasi dengan baik serta memonitoring keberadaan stakeholder kelompok aktor (kelompok sadar wisata ikatan pemuda pecinta alam dan lingkungan kota palopo serta masyarakat). Pengembangan wisata bahari pantai labombo dibagi dalam beberapa prioritas seperti membentuk zonasi wisata, pengoptimalan sarana dan prasarana wisata bahari, adanya promosi wisata dan peningkatan pembinaan serta pemberdayaan pada masyarakat melalui pelatihan. Hal senada juga disampaikan oleh Rahadiarta et al.,(2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan wisata bahari di Desa Jungutbatu dilakukan dan mengikutsertakan berbagai pihak antara lain unsur masyarakat, pemerintah, pengusaha, lembaga swadaya masyarakat serta unsur lainnya. Proses perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan yang baik berdampak pada penerapan manajemen pariwisata bahari yang optimal di Desa Jungutbatu. Di desa tersebut terdapat suatu lembaga yang mengelola kawasan perairan sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam menyampaikan keinginan dan permasalahan yang berkaitan dengan wisata bahari. Dari hasil penelitian sebelumnya terdapat peran kolaborasi lintas sektor sebagai aktor dalam pengembangan wisata bahari. Partisipasi dari masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan pariwisata, dari penelitian tersebut belum tergambarkan sejauh mana peran dari masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

Berikutnya penelitian miliknya Anwar (2014) melihat tentang model konseptual pengembangan wisata bahari. Secara garis besar model konseptual pariwisata berkelanjutan yang diusulkan dengan menentukan sektor unggulan dan membentuk konsorsium yang melahirkan kolaborasi dalam pengelolaan. Lembaga tersebut mewakili seluruh pemangku kepentingan serta bertanggung jawab dalam fungsi koordinasi, kerja sama serta konsultasi dengan otoritas local dan regional, industri pariwisata, komunitas local, institusi akademis, lembaga swadaya masyarakat dan media massa. Pemerintah dituntut untuk memberikan pelatihan mengenai pariwisata berbasis masyarakat. Hal yang sama terdapat pada penelitiannya Wakhidah et al., (2014) dengan berfokus pada bentuk pengembangan wisata. Berdasarkan hasil skoring, lokasi prioritas dalam pengembangan *Sustainable Coastal Tourism* yaitu Wisata Pantai Wonokerto. Luas area prioritas lokasi yaitu 71 Ha yang terletak di Kecamatan Wonokerto meliputi Desa Wonokerto Kulon, Desa Api-Api, Desa Tratebang, Desa Semut, Desa Wonokerto Wetan dan Desa Pecakaran.

Penelitian dari Fikri et al., (2023) berkaitan dengan pengembangan wisata bahari di Pulo Aceh. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 6 (enam) desa berpotensi untuk dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata *snorkeling* dan *diving* di wilayah tersebut dengan aspek tingkat kesediaan masyarakat yang tinggi.



Dalam hasil risetnya terdapat arah prioritas dalam pengembangan wisata diantaranya: (1) mengoptimalkan pengembangan potensi, dukungan serta partisipasi masyarakat sebagai pengelola wisata bahari berkelanjutan; (2) Penyusunan serta pelaksanaan kebijakan pemanfaatan ruang berbasis potensi sumberdaya dengan melibatkan masyarakat setempat dalam pengawasan kegiatan; (3) Peningkatan sarana dan prasarana dalam pengembangan wisata bahari berkelanjutan.

Penelitian Yatmaja (2019) hasil riset menggambarkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat belum dilaksanakan secara baik jika ditinjau dari partisipasi masyarakat terhadap pembangunan wisata. Secara keorganisasian, kelompok Pokdarwis Minang Rua Bahari memiliki inisiatif dan inovasi terhadap pengelolaan pariwisata setempat. Menurut penelitian Emka et al., (2020) hasil penelitiannya menunjukkan adanya tingkat kesesuaian kategori cukup pada wisata snorkeling titik I dan II dengan bobot nilai 78% dan 72,23%, sementara titik III termasuk golongan kategori memenuhi persyaratan dengan jumlah nilai 46%. Selanjutnya, kesesuaian wisata selam pada titik I dan II memenuhi syarat dengan bobot 44.5% dan 38,2%, kemudian, pada titik III termasuk tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan bobot nilai 33,34%. Dilihat dari jumlah perhitungan indeks maka, kesesuaian wisata pantai menunjukkan kategori sangat sesuai dengan bobot penilaian 90% sehingga dapat dikembangkan objek wisata bahari ditempat tersebut.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hidayati & Nugrahani (2021), Penegasan yang kuat dalam penelitiannya yaitu perspektif ketahanan nasional dengan konsep desa wisata bukan hanya membahas tentang *branding* tetapi juga memperhatikan konsep berkelanjutan. Dengan adanya ketahanan yang kuat maka akan berdampak pada pertumbuhan dan kemajuan desa wisata khususnya wisata bahari.

Penelitian dengan topik yang sama dari Nugraha (2020). Hasil penelitian menunjukkan pesona wisata Pantai Mulut Seribu berada pada kurva 1 dengan arti sedang berkembang secara signifikan dengan fokus pengembangan pada strategi SO, *strength* dan *opportunity*. Salah satu perkembangan daya tarik wisatawan terletak pada strategi promosinya melalui festival mulut seribu. Diperkuat dengan partisipasi serta kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam upaya mengembangkan wisata bahari di Pantai Mulut Seribu. Penelitian sejenis ditgaskan pula oleh Suzana & Kapantow (2017). Adapun hasil riset menyatakan posisi pengembangan wisata Pantai Malalayang berada pada kuadran I artinya berada diantara peluang eksternal dan kekuatan internal. Strategi pengembangan wisata bahari setempat yaitu dengan menjaga serta melestarikan lingkungan sekitar, adanya pengembangan fasilitas sarana dan prasarana pada obyek wisata, pengelolaan “sabua bulu” sebagai tempat kuliner dan diharapkan adanya kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam kerjasama untuk mengembangkan Pantai Malalayang secara berkelanjutan

Berdasarkan hasil riset di atas, belum ada penelitian khusus mengkaji tentang sejauh mana tingkat keterlibatan partisipasi masyarakat. Sehingga, salah satu fokus penelitian yang peneliti kaji dalam penelitian ini berkaitan dengan *participative approach* dengan menggunakan tangga partisipasi dalam pengembangan wisata bahari. Dengan fokus kajian tersebut semoga menjadi suatu nilai kebaruan dalam penelitian.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Bahari

Menurut Ditjen Pariwisata, pariwisata bahari merupakan kegiatan wisata yang berhubungan langsung dengan sumberdaya kelautan, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan laut (Yustinaningrum, 2017). Hakikat dari wisata bahari yaitu kegiatan yang mengedapankan aspek kelautan sebagai atraksi utama untuk dikembangkan. Terdapat beberapa konsep kegiatan yang dapat dikembangkan dalam wisata bahari diantaranya rekreasi pantai, peristirahatan, *diving*, *snorkling*, wisata nelayan, berwisata pulau, wisata lamun, memancing, wisata edukasi, dan juga wisata satwa laut.



Sedangkan menurut Sarwono (Masjhoer, 2019) menjelaskan bahwa wisata bahari bukan hanya kegiatan yang berkaitan dengan wisata di atas permukaan laut, namun juga wisata wilayah laut yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan ekosistem dengan keanekaragaman jenis biota laut yang ada didalam laut.

### **Pariwisata Berkelanjutan**

Pengembangan wisata berkelanjutan bukan hanya menarik wisatawan saja namun dapat menjaga kelestarian lingkungan baik secara biologis maupun non biologis seperti sosial budayanya. Senada dengan pernyataan tersebut, Gunawan et al., (2000) menyatakan bahwa pengembangan industri pariwisata berkelanjutan berarti mempersatukan aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan industri pariwisata. Artinya, sektor publik perlu untuk mengatur perkembangan pariwisata agar usaha bisnis dapat melindungi sumber daya kelautan yang ada sekarang serta dimasa depan. Esensi dari pembangunan pariwisata berkelanjutan yaitu adanya usaha penjaminan agar sumber daya kelautan, sosial dan budaya yang dimanfaatkan dalam pembangunan pariwisata pada tahap sekarang dapat dirasakan oleh generasi yang akan datang. Dengan kata lain, pembangunan pariwisata harus memperhatikan kriteria berkelanjutan yang didasarkan pada ekologis dalam jangka panjang (Arida & Sunarta, 2017).

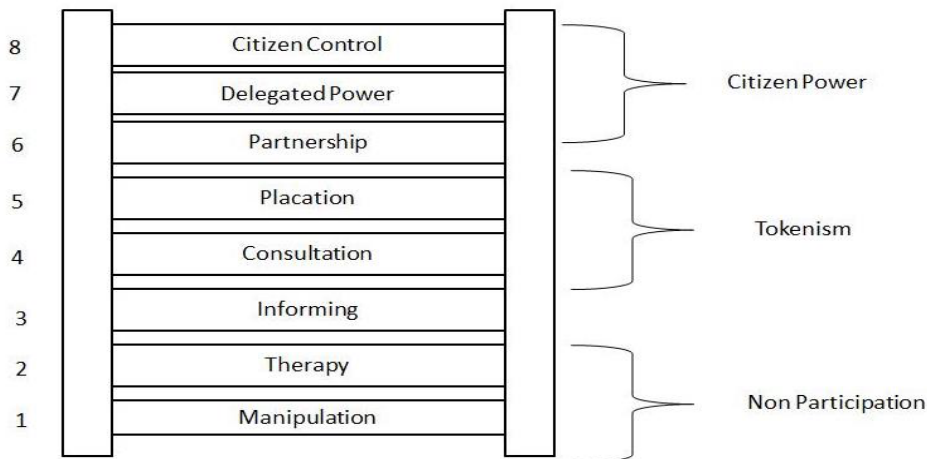
### **Pengertian *Partisipative Approach***

Kata partisipasi sering diterjemahkan sebagai keikutsertaan terhadap kegiatan (Rahim, 2004). Jika dilihat dari berbagai sudut pandang maka terdapat berbagai macam defenisi partisipasi. Menurut Cohen dan Uphof dalam (Kalesaran, 2015) partisipasi dapat dibedakan dalam 4 (empat) bentuk meliputi: ikutserta dalam pengambilan keputusan, ikutserta dalam pelaksanaan, ikutserta dalam pengambilan manfaat dan ikutserta dalam evaluasi. Selanjutnya, menurut Isbandi dalam (Khairi, 2019) esensi dari partisipasi yaitu terlibatnya mereka dalam berbagai rangkaian pengidentifikasian masalah serta pemilihan dan pengambilan keputusan berkaitan dengan alternatif solusi untuk permasalahan, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses evaluasi upaya tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam konteks pembangunan, meliputi kegiatan pembangunan ataupun ikutserta dalam memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (BAPPEDA, 2017). Pendekatan partisipatif (*Partisipative Approach*) ini dapat berasal dari kelompok-kelompok masyarakat yang strategis. Kelompok strategis yaitu masyarakat yang dinilai mengetahui tentang potensi, keadaan, masalah serta hambatan dan kemauan masyarakat setempat, maka harus berdasarkan skala prioritas, dengan kata lain bersifat *acceptable* atau dapat diterima oleh masyarakat luas dan dianggap dapat dipercaya atau (*reliable*) untuk dapat diimplementasikan program pembangunan secara efektif dan efisien.(BAPPEDA, 2017).

## Tangga Partisipasi

(Arnstein's, 1969) mendeskripsikan partisipasi dengan tingkatan-tingkatan atau disebut sebagai tangga partisipasi seperti pada gambar di bawah ini.

**Gambar 1. Tangga Partisipasi Arnstein**



Tangga Partisipasi Arnstein menyebutkan tingkat partisipasi paling dasar adalah *Non Participation* yaitu pada manipulasi (*manipulation*) dan terapi (*therapy*) yang bertujuan untuk mendidik dan mengobati masyarakat. Pada manipulasi tidak ada komunikasi, sedangkan pada tahap terapi mulai terdapat komunikasi hanya saja masih terbatas, inisiatif yang ditimbulkan berasal dari pemerintah dan bersifat satu arah. Kemudian tingkat selanjutnya adalah Tingkat Tanda partisipasi (*Tokenism*) yaitu pada tangga tiga (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima). Pada tahapan ini partisipasi masyarakat mulai terlihat melalui pendapat, informasi, harapan yang didengar dan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Tahap informasi (*information*) memberikan indikasi bahwa komunikasi atau proses penyampaian informasi sudah intens dilakukan tetapi masih satu arah, belum ada timbal balik seperti pengumuman, laporan atau selebaran dan sebagainya. Tahap konsultasi (*consultation*) ini telah terjadi komunikasi dua arah namun hanya bersifat formalitas, sudah ada bentuk kegiatan penjangkaran aspirasi, penyelidikan, aturan pengajuan proposal, harapan aspirasi didengar namun tak ada jaminan untuk diwujudkan. Lalu pada tahap penentraman (*placation*) ini, komunikasi telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan adanya negosiasi antara masyarakat dengan pemerintah, kalangan masyarakat rentan dan marjinal dimungkinkan untuk dapat memberikan aspirasi namun proses *decision making* masih dipegang oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan. Tingkat paling atas dalam tangga partisipasi adalah tingkat Kuasa Masyarakat (*citizen power*) yang terdapat mulai dari tangga ke-6, ke-7 dan ke-8 yaitu masyarakat mulai berperan dalam proses pengambilan keputusan yang juga melibatkan masyarakat yang rentan dan marjinal, hasil kebijakan yang diperoleh adalah dengan adanya hubungan kemitraan dimana masyarakat yang bernegosiasi dengan pemegang kekuasaan di posisi yang sejajar dan terdapat pendelegasian wewenang. Pada tingkat kendali warga (*citizen control*) masyarakat terlibat secara politik dan administrative, bahkan masyarakat dapat mengelola suatu objek kebijakan tertentu secara penuh.

## METODE PENELITIAN



Penelitian ini diusung dengan desain deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Walidin dalam (Fadli, 2021) penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan tujuan memahami fenomena-fenomena dari manusia ataupun sosial yang disajikan dalam bentuk kata-kata. Senada dengan yang disampaikan oleh (Basrowi, 2008) penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai bentuk penelitian yang menghasilkan hasil akhir dalam bentuk gambaran, uraian meliputi kata-kata tertulis maupun lisan melalui orang-orang yang diamati. Teknik penentuan informan menggunakan metode “*purposive sampling*” dan untuk menganalisa perkembangan informasi dalam penelitian ini peneliti menggunakan prinsip “*snowball*” (bola salju) yaitu memilih orang tertentu yang dianggap dapat memberikan data yang diperlukan, sehingga melalui informasi yang disampaikan akan diperoleh informasi informan berikutnya dan dilakukan secara bergulir (Sugiyono, 2012). Hal yang sama disampaikan oleh Salganik dalam (Lenaini, 2021) *snowball* merupakan suatu metode yang sifatnya bergulir dari responden ke responden lainnya. Informan kunci dalam penelitian ini yaitu Disbudpar Kabupaten Simeulue, Kepala Desa Busung. Setelah informasi berkembang terdapat penambahan informan yaitu Bappeda Kabupaten Simeulue, masyarakat pelaku usaha wisata dan wisatawan. Analisis data dimulai sejak berlangsungnya proses kegiatan pengumpulan data, reduksi data, display data dan verifikasi dan penegasan kesimpulan. Reduksi data berkaitan dengan peringkasan data, mengkode, menelusur tema dan membuat gugus-gugus (Rijali, 2018). Pengujian kredibilitas data dilaksanakan melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, melakukan diskusi dengan teman sejawat, serta member check (Johnson, Adkins, & Chauvin, 2020).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Lokasi penelitian terletak di Desa Busung Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh. Desa Busung memiliki luas 10 Ha dan memiliki 201 Kepala Keluarga dengan total 672 jiwa, desa ini dipilih menjadi lokasi penelitian karena lokasi desa sangat strategis yang mewakili wisata bahari di Kabupaten Simeulue. Pantai Busung memiliki daya tarik diantaranya hamparan batu karang, hamparan pasir putih, vegetasi cemara dan pepohonan kelapa yang teduh, air laut yang jernih dengan kumpulan koral yang beraneka ragam corak, selain itu lokasinya berdekatan dengan pusat kota Sinabang, Ibu Kota Kabupaten Simeulue. Kabupaten Simeulue merupakan wilayah berupa kepulauan, dimana terdapat ± 57 pulau besar dan kecil (Pemerintahan Kabupaten Simeulue, 2022) ditambah lagi dengan luas seluas 219,80 Hektar atau 88 persen dari total luas daerah wisata di Kabupaten Simeulue (Pusat Data, 2015) ini menjadi potensi yang besar dalam pengembangan wisata bahari yang berkelanjutan. Potensi yang ada tersebut sebenarnya sudah disadari oleh pemerintah Kabupaten Simeulue sendiri. Berdasarkan hasil penelitian Pemerintah Kabupaten Simeulue telah melakukan beberapa langkah strategi untuk pengembangan wisata bahari berkelanjutan meskipun hasil yang diperoleh belum terlihat optimal. Adapun langkah yang dilakukan dapat kita klasifikasikan ke dalam tangga partisipasi dari Sherry R. Arnstein (Arnstein's, 1969). Tujuan klasifikasi tersebut untuk melihat sejauh mana tingkat keikutsertaan masyarakat dalam upaya pengembangan wisata bahari berkelanjutan di Desa Busung. Secara hirarki tangga partisipasi dibagi dalam 3 tahap meliputi tahap *Non Participation*, *Tokenism* dan *Citizen Power*. Dalam pelaksanaannya tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan wisata berkelanjutan berada pada tahap *tokenism*.

Berikut merupakan penjelasan tahapan tangga partisipasi dalam pengembangan wisata bahari di desa Busung yang meliputi:

### Tahap *Non Participation*





Tahap *Non Participation* ini melihat adanya upaya pemerintah yang bertujuan untuk mendidik masyarakat, memberikan informasi, edukasi, sosialisasi maupun pelatihan. Tahapan ini memiliki komunikasi satu arah, dimana pemerintah yang lebih aktif memberikan informasi kepada masyarakat. Jika dilihat dari esensi *non participation* pemerintah telah melakukan kegiatan pelatihan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bapak Asmanuddin

*“kita biasanya ada pelatihan yang diberikan, kita undang masyarakat di lingkup kabupaten, walaupun pesertanya terbatas sudah mewakili dari beberapa kecamatan, merkea nantinya akan menjadi ujung tombak kita untuk mentransormasikan infromasi yang telah mereka terima, biasanya kegiatan tersebut dilakukan dalam setahun sekali menyesuaikan dengan anggaran”.* (Wawancara, Asmanuddin 23 Maret 2023).

Terkait pengembangan wisata bahari berkelanjutan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Simeulue telah melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

### **Penyelenggaraan Pelatihan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Simuelue**

Pelatihan diberikan kepada kelompok sadar wisata dan masyarakat desa serta pemuda dalam pembangunan keparawisataan Kabupaten Simelue untuk dapat berupaya bersama pemerintah dalam melakukan pengembangan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan melalui pariwisata. Selain itu, peserta pelatihan lainnya terdiri dari pelaku usaha pariwisata khususnya pemilik wisma, *resort* maupun *home stay* yang ada di Kabupaten Simeulue. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan berupa Bimtek terkait Pengembangan *Homestay* dan Desa Wisata yang diselenggarakan oleh Disbudpar bersama dengan Kementerian Pariwisata pada tahun 2019 yang lalu. Kegiatan Bimtek dihadiri oleh 40 (empat puluh) peserta terdiri dari pemilik usaha dan perwakilan masyarakat desa wisata.

Secara tegas dinas terkait mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Simelue memiliki kewajiban untuk memberikan pelatihan yang bersifat khusus untuk pembangunan keparawisataan Kabupaten Simelue karena berkaitan dengan pencapaian misi-nya yaitu pengembangan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan. Dalam pembangunan *spot-spot* pariwisata, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk tidak merusak lingkungan hal tersebut sesuai dengan amanat pembangunan berkelanjutan. Tujuan dilaksanakan pelatihan yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam pengelolaan wisata berkelanjutan. Berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan, semenjak covid-19 hingga saat ini pelatihan yang sejenis belum diadakan kembali oleh Disbudpar Kabupaten Simeulue. ihwal tersebut berkaitan dengan perubahan alokasi anggaran karena adanya prioritas program yang lain oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue.

### **Melaksanakan kampanye Lingkungan dan Edukasi Kebersihan Lingkungan**

Kepala Disbudpar menyatakan

*“kita ikut serta turun kelapangan dalam mengkampanyekan dan melaksanakan satu kegiatan yang bernama perang sampah, perang sampah kita lakukan dibeberapa kecamatan dan titik destinasi meskipun tidak tercover disemua titik, kita undang masyarakat sekitar, kita fasilitasi serta kita berikan pemahaman terkait sampah, setelah itu baru kita bersama-sama memilih sampah yang ada dipantai untuk kita bersihkan, kegiatan ini kemarin juga ktita libatkan dari pihak kepolisian dan lainnya”.* (Wawancara, Asmanuddin 23 Maret 2023).

Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Simeulue dalam pengembangan potensi wisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah melaksanakan kampanye di enam titik kegiatan terkait perang sampah. Dalam hal

ini terdapat program *Cleanliness* (kebersihan), *Health* (kesehatan), *Safety* (keamanan), dan *Environment Sustainability* (kelestarian lingkungan) atau di singkat dengan CHSE yang merupakan jargonnya kementerian pariwisata yang diaplikasikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulu. Pemerintah mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan dengan melibatkan juga Kepolisian, Dinas Kelautan dan Perikanan dalam hal menjaga lingkungan. Walaupun belum ada tanggung jawab secara hitam diatas putih, namun Disbudpar menghimbau kepada masyarakat bahwa menjaga kelestarian lingkungan menjadi tanggung jawab moral bersama. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah namun juga Pemerintah Desa beserta masyarakat desa, termasuk Desa Busung.

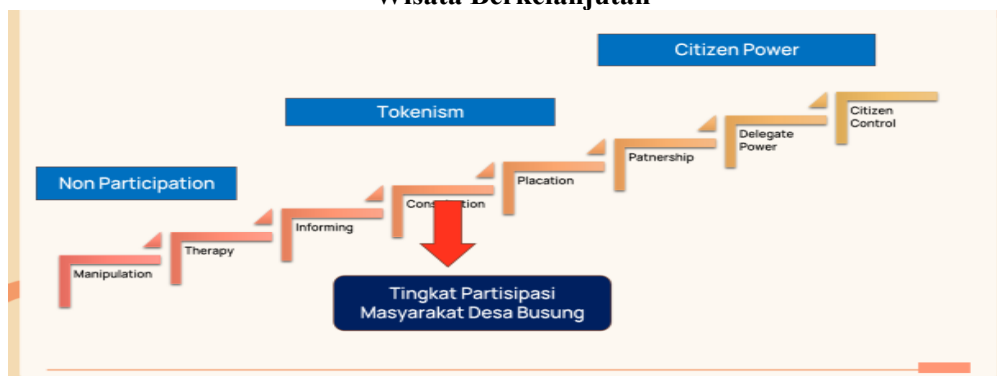
Tujuan kegiatan sosialisasi tersebut memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan pantai demi kelestarian sumber daya alam. Selain itu, mengajak masyarakat bukan hanya memerangi sampah namun juga menjaga kesehatan dan keamanan sekitar pantai, agar dapat mewujudkan wisata bahari yang berkelanjutan.

### Tahap *Tokenism*

Pada tahap *tokenism*, partisipasi masyarakat dalam pembangunan terdiri dari 3 tingkat, yaitu *information*, *consultation* dan *placation*. Hakikat dari tahap *tokenism* yaitu mulai terlihatnya partisipasi masyarakat melalui pendapat, informasi, harapan yang didengar dan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Artinya sudah adanya aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah tentang keinginan masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian tingkat partisipasi masyarakat pada tahap *tokenism* baru mencapai tangga *consultation* atau tangga keempat. Tangga (*consultation*) ditandai dengan adanya komunikasi dua arah akan tetapi komunikasi tersebut bersifat formalitas. bentuk kegiatan pada tahapan ini seperti kegiatan penjarangan aspirasi, penyelidikan, aturan pengajuan proposal, harapan aspirasi didengar namun belum ada jaminan untuk diwujudkan.

**Gambar 2. Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Busung dalam Pengembangan Wisata Berkelanjutan**



Adapun beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai tingkat partisipasi tahapan *tokenism* tersebut sebagai berikut:

### Survei lapangan yang dilakukan oleh Disbudpar Kabupaten Simeulue

Kegiatan survei dilakukan oleh Disbudpar Kabupaten Simeulue ke lokasi-lokasi pariwisata di Simeulue yang kemudian menjadi sasaran pembangunan pada periode selanjutnya. Pantai Busung telah dilakukan survei oleh Disbudpar untuk melihat kondisi fasilitas disekitar pantai Busung yang memang sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Kondisi yang kurang tersebut kemudian direncanakan oleh



Disbudpar untuk masuk dalam rencana anggaran tahun 2023. Pembangunan yang akan dilakukan ialah pembangunan gazebo dan kedai-kedai kecil sekitar pantai untuk dapat digunakan oleh masyarakat.

### **Penyusunan Proposal terkait Desa Wisata Busung**

Pemerintah Desa Busung sudah melakukan penyusunan proposal terkait pengusulan desa Busung menjadi Desa Wisata. Namun hal tersebut masih belum dapat terealisasi sebagaimana yang diharapkan oleh Pemerintah Desa. Hal tersebut didukung oleh pernyataan kepala desa Busung yaitu Munawarra berikut:

*“iya sudah dibangun segala usaha dari proposal dan segala macam untuk buat yang ini pun sudah kita jumpai masyarakat yang memiliki tanah seandainya ini dibangun sama pemerintah yakan untuk wisata” Beliau juga menjelaskan: “saya juga optimis pantai busungkan ini bisalah kita ajukan untuk dibantu sama pemerintah untuk pengembangan wilayah karena kalau dari dana desakan tak sanggup kita biyai”. (Wawancara, Munawarra, 23 Maret 2023).*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pemerintah desa tidak menerima informasi terkait kejelasan pengusulan proposal yang telah diajukan. Dalam proses pengusulan proposal ini Pemerintah Desa telah menjalin komunikasi dengan pemerintah melalui dinas terkait dan juga dengan anggota DPRK Kabupaten Simeulue untuk kemudian diusulkan ke Pemerintah Pusat. Komunikasi yang telah dilakukan tersebut menjadi salah satu bentuk upaya partisipasi masyarakat yang sudah terjadi secara kedua belah pihak. Sehingga kondisi tersebut sangat mendukung terhadap penjelasan sebelumnya bahwa pada tahap ini sudah terbentuk pola komunikasi dua arah, namun belum ada kolaborasi secara berlanjut untuk direalisasikan.

### **PEMBAHASAN**

Merujuk dalam tangga partisipasi, tingkatan teratas tangga partisipasi yaitu tingkat kuasa masyarakat (*citizen power*). Tahapan ini ditandai dengan peranan masyarakat yang kuat dan dominan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Busung dalam pengembangan wisata berkelanjutan belum sampai pada tahapan *citizen power* melainkan berada pada tahapan Tokenism tingkat ke 4 yaitu *consultation*. Esensi dari tahapan *non participation* yaitu melihat upaya pemerintah dengan tujuan mendidik masyarakat, memberikan informasi, edukasi, sosialisasi hingga pelatihan. Tahapan *non participation* merupakan tahapan yang paling rendah kedudukannya dalam tingkat partisipasi. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahapan tersebut yaitu penyelenggaraan pelatihan oleh Disbudpar Kabupaten Simeulue dengan target sasaran kelompok sadar wisata dan masyarakat desa serta pemuda dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Simeulue. Kegiatan selanjutnya yaitu melaksanakan kampanye lingkungan dan edukasi lingkungan. Kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui Disbudpar yaitu kampanye dalam memerangi sampah, kegiatan tersebut dilaksanakan di 6 (enam) titik atau lokasi di Simeulue, turunan program Kementerian *Cleanliness, Healt, Safety* dan *Environment* (CHSE) juga diperkenalkan kepada masyarakat melalui Disbudpar. Secara garis besar pemerintah selaku *policy maker* telah melakukan beberapa tindakan yang dapat dikategorikan dalam bentuk *non participation*. Dalam riset Yatmaja (2019) disebutkan bahwa tahapan pemberdayaan masyarakat belum dilakukan secara optimal jika ditinjau dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan. Kemudian hasil penelitian Rahadiarta et al., (2021), Bibin et al., (2018) bahwa harus melibatkan masyarakat dan lembaga terkait (kelompok sadar wisata) dalam pengelolaan wisata. Point penting dari temuan peneliti dan periset sebelumnya yaitu harus



dilakukan upaya ekstra oleh pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan wisata melalui pelatihan-pelatihan ataupun kegiatan sosialisasi, pemerintah harus mendukung penuh kelompok-kelompok sadar wisata sehingga terwujudnya daerah wisata.

Tahapan berikutnya dalam tangga partisipasi yaitu Tokenism. Pada tahapan ini kegiatan *informing* merupakan kegiatan dasar dalam tahapan tokenism, peranan masyarakat pada tahapan *informing* yaitu adanya pendapat, informasi bahkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah. bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan pada kegiatan ini yaitu survey lapangan yang dilakukan oleh Disbudpar, adapun harapan dari masyarakat dan pemerintah desa yaitu agar adanya prioritas pembangunan pengembangan wisata di Pantai Busung. Kemudian tingkatan selanjutnya dalam tahap Tokenism yaitu *consultation*, tahapan ini ditandai dengan adanya komunikasi dua arah. Bentuk pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan pada kegiatan ini yaitu adanya penyusunan proposal terkait desa wisata Busung yang diajukan namun belum terelealisasi. Dari hasil temuan penelitian dapat dikaitkan dengan riset sebelumnya bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata sangat dibutuhkan perannya, meskipun peran partisipasi dari masyarakat masih pada tahapan *consultation* akan tetapi sudah ada keterlibatan masyarakat dalam memajukan pembangunan dan pengembangan pariwisata hal ini sesuai dengan hasil yang telah diteliti oleh periset sebelumnya.

### **Peluang dan Hambatan Pengembangan Wisata Bahari Berkelanjutan di Desa Busung**

Jika dilihat dari segi peluang, Desa Busung memiliki beberapa modalitas dalam pengembangan wisata bahari diantaranya letak atau lokasi pantai busung yang strategis karena berjarak kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit dari kota sinabang artinya, Desa Busung dapat dijadikan sebagai salah satu *list* bagi wisatawan untuk berkunjung ke pantai Busung mengingat akses yang mudah menuju kelokasi. Potensi sumber daya alam dengan keindahan pantainya menjadi daya tarik bagi wisatawan. Adanya upaya pelestarian seni budaya simeulue menjadi bagian dari upaya promosi kebudayaan serta adanya dukungan dari masyarakat desa dalam pengembangan desa wisata. Jika dilihat dari temuan riset Fikri et al.,(2023) dan penulis, sama-sama ditemukan kesediaan atau keinginan masyarakat untuk dijadikan daerahnya sebagai desa wisata. Hal senada juga disampaikan oleh Nugraha (2020) adanya festival mulut seribu sebagai bentuk promosi. Dalam pengembangan wisata nilai-nilai budaya penting untuk diperkenalkan sehingga akan menjadi nilai tambah desa wisata. Desa busung memiliki satu sanggar kesenian yang mempromosikan nilai-nilai seni budaya seperti Debus dan tarian khas Simeulue lainnya. Dengan adanya kesenian budaya tersebut dapat dijadikan sebagai pemikat wisatawan. Kemudian, salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap pariwisata yaitu dengan menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA). RIPPDA merupakan rencana strategis sebagai *blue print* dari pengembangan wisata di suatu daerah. Pada tahun 2023 RIPPDA Kabupaten Simeulue sedang dalam proses penyusunan dan akan disosialisasikan tahun 2024.

Selain peluang, terdapat pula hambatan dalam pengembangan wisata bahari berkelanjutan di desa busung antara lain terbatasnya anggaran desa dalam pengembangan wisata di desa busung, belum adanya pengelolaan sumber daya alam pesisir busung, belum optimalnya pengelolaan sampah di pantai busung. Pengelolaan sampah di pantai busung masih terbatas pada pengumpulan di titik-titik tertentu seperti di kafe-kafe, untuk pengelolaan secara khusus yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa di sepanjang bibir pantai belum optimal, tidak ditemukan tempat sampah khusus di pantai tersebut.

Salah satu kelemahan dalam penelitian ini yaitu objek dalam penelitian hanya meneliti satu desa dalam pengembangan wisata bahari sehingga tidak ada perbandingan informasi dan data dengan desa lain dalam penelitian. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan waktu peneliti dalam melakukan penelitian. Jika dilihat dari letak geografis kabupaten simeulue merupakan wilayah potensial dalam panorama wisata bahari sehingga terdapat beberapa desa yang termasuk dalam pengembangan wisata. Adapun agenda



kegiatan selanjutnya dalam penelitian yaitu akan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana strategi pemerintah setempat dalam pengembangan wisata berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal. Ihwal ini menarik untuk diteliti karena simeulue selain kaya dengan potensi wisata bahari juga kaya dengan keberagaman budaya sehingga, menarik apa bila dikatikan antara wisata dan budaya setempat.

## KESIMPULAN

Pengembangan wisata bahari berkelanjutan di Desa Busung Kecamatan Teupah Tengah masih berada pada tingkat *Consultation*. Esensi dari *consultation* yaitu telah terlaksana beberapa kegiatan seperti penjarangan aspirasi melalui pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan Teupah Tengah, kunjungan lapangan oleh Disbudpar, adanya pengajuan proposal untuk pengembangan wisata pantai busung. Dari upaya tersebut belum berdampak baik pada wisata bahari di Desa Busung. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan dengan meningkatkan koordinasi dan kerja sama secara pentahelix dengan melibatkan multisektor. Selain itu terdapat batasan penelitian ini yang hanya sebatas mengkaji tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata bahari berkelanjutan di Desa Busung, Kabupaten Simeulue. Namun demi keberlanjutan dan pengkajian secara lebih komprehensif maka, penelitian ini nantinya dapat dikembangkan dengan mengkaji Strategi pembangunan wisata bahari berkelanjutan berbasis *local wisdom* di Desa Busung ataupun mengkaji mengenai Pengelolaan wisata bahari berkelanjutan dalam mewujudkan desa wisata yang nantinya diharapkan dapat mendalami lagi akan dinamika pengembangan wisata di Desa Busung.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Rektor Universitas Teuku Umar, Ketua LPPM-PMP Universitas Teuku Umar, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta Kaprodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Teuku Umar atas kepercayaan yang diberikan. Terima Kasih kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue, BAPPEDA Kabupaten Simeulue, Pemerintah Desa Busung dan seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penelitian dari awal hingga akhir. Penelitian ini merupakan hasil dari penelitian hibah penugasan yang dibiayai oleh DIPA Universitas Teuku Umar Tahun 2022 dengan Nomor Kontrak 01/UN59.7/SPK-PPK/2023 Tanggal 14 Februari 2023.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, R. (2014). Model Konseptual Pengembangan Wisata Bahari Secara Berkelanjutan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Makassar. *Journal of Tourism Destination and Attraction*, 2(1), 15–26.
- Arida, I. N. S., & Sunarta, N. (2017). Pariwisata berkelanjutan. *Pariwisata Berkelanjutan*.
- Arnstein's, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- BAPPEDA. (2017). *Teori Partisipasi : Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Menurut Para Ahli*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng.
- Basrowi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta.
- Bengen, D. G. (2000). *Prosiding Pelatihan untuk Pelatih Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Bogor, 21-26 Februari 2000*.
- Bibin, M., Vitner, Y., & Imran, Z. (2018). Analysis of stakeholder in the development of Labombo Beach sustainable town in Palopo City Analisis pemangku kepentingan dalam pengembangan wisata bahari Pantai Labombo secara berkelanjutan di Kota Palopo. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 31(1),



62–71.

- Emka, J., Restu, I. W., & Saraswati, S. A. (2020). Analisis Kesesuaian Pengembangan Wisata Bahari Berkelanjutan Di Pantai Jemeluk, Amed, Karangasem, Bali. *Current Trends in Aquatic Science*, 3(2), 76–83.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fikri, M., Munibah, K., & Yulianda, F. (2023). Pengembangan Wisata Bahari di Wilayah Pesisir Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan)*, 7(1), 91–106.
- Gunawan, M. P., Nasikun, K., Parikesit, D., & Tribuwani, W. (2000). Agenda 21 Sektor: Agenda Pariwisata untuk Pengembangan Kualitas Hidup Secara Berkelanjutan. *UNDP-Kantor Menteri Lingkungan Hidup. Jakarta.*
- Hidayati, K., & Nugrahani, H. S. D. (2021). Pengelolaan Desa Wisata Bahari Berkelanjutan dalam Perspektif Ketahanan Nasional. *..*, 2(1), 94–103.
- Johnson, J. L., Adkins, D., & Chauvin, S. (2020). A review of the quality indicators of rigor in qualitative research. *American Journal of Pharmaceutical Education*, 84(1), 138–146. <https://doi.org/https://doi.org/10.5688/ajpe7120>
- Kalesaran, F. (2015). Partisipasi dalam program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan kelurahan Taas Kota Manado. *Jurnal Ilmiah Society*, 1(15), 56–73.
- Khairi, A. (2019). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa baru sungai medang kecamatan air hangat timur kabupaten kerinci: awal khairi, s. Sos., map. *Jurnal administrasi nusantara maha*, 1(1), 88–104.
- Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39.
- Masjhoer, J. M. (2019). *Pengantar Wisata Bahari* (E. Sugiarto (ed.); 1st ed.). Khitah Publishing.
- Maulana, A. (2021). *Indonesia Bisa Kelola Lebih Banyak Sektor Pariwisata Bahari*. Universitas Padjajaran.
- Nauli, A. F. (2020). *Strategi Pelayanan Dalam Rangka Meningkatkan Kunjungan Wisata ke Pantai Busung (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Simeulue)*. Universitas Medan Area.
- Nugraha, Y. E. (2020). Pengembangan Wisata Bahari Pantai Mulut Seribu Sebagai Daya Tarik Wisata Berkelanjutan Di Kabupaten Rote, Nusa Tenggara Timur. *Journey: Journal of Tourismpreneurship, Culinary, Hospitality, Convention and Event Management*, 2(2), 25–46.
- Pemerintahan Kabupaten Simelue. (2022). *Letak Geografis Kabupaten Simeulue*. <https://Simeuluekab.Go.Id/>.
- Pusat Data, S. dan I. K. K. dan P. (2015). *Profil Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeuleu* (D. Arriyana (ed.)). Pusat Data, Statistik, dan Informasi.
- Rahadiarta, I., Wiranatha, A. S., & Sunarta, I. N. (2021). Penerapan Empat Fungsi Manajemen pada Pengelolaan Pariwisata Bahari Berkelanjutan di Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 669(8), 1.
- Rahim, E. I. (2004). Partisipasi Dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Perspektif Kebijakan Publik*.
- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta Bandung.
- Suzana, B. O. L., & Kapantow, G. H. M. (2017). Strategi Pengembangan Wisata Bahari Pantai Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. *Agri-Sosioekonomi*, 13(1A), 277–284.
- Wakhidah, K., Dewi, S. P., & Ristianti, N. S. (2014). Bentuk Pengembangan Pariwisata Pesisir



- Berkelanjutan Di Kabupaten Pekalongan. *Ruang*, 1(2), 261–270.
- Wiranto, S. (2020). Membangun kembali budaya maritim Indonesia melalui kebijakan kelautan Indonesia dengan strategi pertahanan maritim Indonesia: perspektif pertahanan maritim. *Jurnal Maritim Indonesia*, 8(2), 110–126.
- Yatmaja, P. T. (2019). *Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dalam Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan (Studi pada Pokdarwis Minang Rua Bahari di Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan)*.
- Yustinaningrum, D. (2017a). Pengembangan Wisata Bahari Di Taman Wisata Perairan Pulau Pieh Dan Laut Sekitarnya. *Program Pascasarjana, Universitas Brawijaya Malang*, 11(1), 96–111.